

THE ROLE OF THE DUTCH EAST INDIES GOVERNMENT IN BUILDING PONTIANAK CITY CENTER

Peran Pemerintah Hindia Belanda Dalam Membangun Pusat Kota Pontianak

Andang Firmansyah^{1a*}, Edwin Mirzachaerulsyah^{2b}

¹²Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

^aandang.firmansyah@fkip.untan.ac.id

^bedwin.mirzachaerulsyah@fkip.untan.ac.id

(*) Corresponding Author

andang.firmansyah@fkip.untan.ac.id

How to Cite: Firmansyah, A., dkk. (2023). Peran Pemerintah Hindia Belanda Dalam Membangun Pusat Kota Pontianak. *Santhet*, 7(2), doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 30-08-2023

Revised : 06-10-2023

Accepted : 06-11-2023

Keywords:

Pontianak,
 Netherlands,
 Buildings

Abstract This research aims to discuss the role of the Dutch East Indies Government in developing the Tanah Seribu area which is now known as Pontianak Kota District. Pontianak Kota District is currently the center of Pontianak City because of the infrastructure that the Dutch built. Dutch heritage buildings contain history that people have begun to forget due to the times. This research method uses a historical method which consists of five stages, namely topic selection, source collection, verification, interpretation and writing. The results of this research reveal the history of buildings left by the Indies government as evidence that the Dutch played a role in forming the center of Pontianak City. Several Dutch heritage buildings were very useful for the Pontianak City Government in the early days of Indonesian independence. Indonesia's unstable conditions do not allow the government to build facilities, so the City Government utilizes Dutch heritage buildings. Some of the buildings are still in use today, and have even become Pontianak City Cultural Heritage because they contain historical significance. This determination shows that the Dutch East Indies Government also left good things for Indonesia.

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara, kita dituntut untuk mengetahui sejarah bangsanya. Warga negara yang paham dengan sejarahnya akan memiliki kerakter yang kuat dan membentuk identitas bangsa. Indonesia adalah negara majemuk yang kaya akan kebudayaan dan sejarah. Indonesia yang saat ini kita jumpai adalah hasil dari percampuran kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Mulai dari Masa Prasejarah, Peradaban Hindu-buddha, Peradaban Islam, Masa Kolonial, dan Masa Kemerdekaan. Semua masa tersebut digambarkan sebagai masa keemasan bangsa Indonesia kecuali masa kolonial. Pada masa kolonial, bangsa yang mendiami wilayah Indonesia atau pada masa lalu dikenal dengan Nusantara adalah bangsa yang lemah, karena mudah dikendalikan oleh bangsa asing berkulit putih seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Jepang (Zed, 2017). Kerajaan-kerjaan di wilayah Nusantara seakan hanya menjadi boneka bangsa asing terutama Belanda. Para Raja banyak yang menjadi perpanjangan tangan Belanda dalam menindas rakyat. Tidak heran ketika kursi Presiden Indonesia pertama diduduki oleh Soekarno, beliau sangat membenci bangsa barat terutama Belanda. Bahkan pada tahun 1950 orang Belanda totok dan Indo (campuran Indonesia dan Belanda) diusir dari negara Indonesia (Putra, 2023).

Konsep klasik yang tidak pernah hilang hingga saat ini adalah kalimat “sejarah ditulis oleh pemenang”. Indonesia bisa dikatakan pemenang dalam pertempuran melawan penjajah Belanda,

sehingga berhak menulis sejarahnya (Hagijanto, 2022). Namun pada kenyataannya banyak sejarah yang dilupakan atau sengaja ditutupi oleh pemerintah. Ada dugaan bahwa tujuan pemerintah hanya menyampaikan sisi buruk Belanda di Indonesia karena ingin menumbuhkan semangat Nasionalisme. Kebencian pemerintah Orde Lama terhadap bangsa Barat menyebabkan sejarah masa kolonial yang disampaikan kepada masyarakat tidak utuh (Putra, 2023)

Pada dasarnya, setiap peristiwa yang terjadi tentu akan memberikan dampak negatif dan positif, tergantung sudut pandang yang kita gunakan. Belanda memang banyak menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia, seperti tanam paksa, politik adu domba, kerja paksa, dan masih banyak lagi (Hasanuddin, 2014). Namun perlu diingat juga bahwa mungkin jika bangsa asing terutama Belanda tidak menjajah Indonesia, wilayah negara Indonesia masih menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang sering berkonflik. Negara Indonesia masih menggunakan warisan yang Belanda buat pada masa lalu, salah satunya adalah wilayah negara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini adalah bekas wilayah Hindia Belanda, yang dibentuk oleh Belanda dengan cara penaklukan kerajaan-kerajaan di Nusantara (Zed, 2017).

Selain wilayah negara, pemerintah Indonesia masih banyak yang memanfaatkan bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Hindia Belanda memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan Kota Pontianak. Kota Pontianak pada masa Belanda difungsikan sebagai pusat perdagangan pulau Borneo bagian Barat atau Kalimantan Barat. Sehingga banyak infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Pontianak (Listiana, 2009). Infrastruktur yang Belanda buat hingga saat ini masih digunakan dan ada yang sementara waktu dikosongkan karena belum ada pihak yang mengajukan peminjaman gedung kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Infrastruktur tersebut berupa bangunan yang didesain dengan arsitektur Indis. Menurut (Tutuko, 2003) arsitektur Indis adalah seni dalam mendesain wujud bangunan dengan mencampurkan seni bangunan dari Eropa dan lokal karena mempertimbangkan kondisi dan situasi daerah Indonesia. Beberapa bangunan peninggalan Belanda di Kota Pontianak bahkan sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa asing juga berperan dalam pembentukan kebudayaan dan sejarah bangsa Indonesia, namun berusaha untuk ditutupi oleh pihak yang memiliki kepentingan. Sama halnya dengan sejarah beberapa bangunan peninggalan Belanda masih belum ditulis secara lengkap. Berdasarkan pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, salah satu syarat suatu objek ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa kajian tentang sejarah sangat penting dilakukan bagi suatu objek agar dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Berdasarkan uraian diatas, Penelitian ini berfokus pada sejarah Pontianak agar merekonstruksi ulang ingatan masyarakat bahwa bangsa asing berperan dalam terciptanya sejarah Indonesia khususnya Kota Pontianak dan sejarah bangunan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian penetapan Objek Cagar Budaya. Penelitian ini juga salah satu bentuk pengembangan Cagar Budaya karena dapat memperdalam kajian nilai sejarah yang terkandung dalam bangunan Cagar Budaya maupun bangunan Objek Diduga Cagar Budaya (Atmudjo et al., 2023)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang mengkaji peran pemerintah Hindia Belanda dalam membangun infrastruktur di Kota Pontianak dan sejarah dari bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang masih digunakan hingga saat ini. Dalam penelitian ini, deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang penulis gunakan. Metode penelitian ini menggunakan prosedur

penelitian sejarah Kuntowijoyo, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Pengumpulan sumber penulis lakukan dengan studi kearsipan di Kota Pontianak, penulis menemukan arsip dan buku-buku sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya penulis melakukan verifikasi atau kritik sumber yang bertujuan untuk menilai apakah sumber yang ditemukan kredibel atau dapat dipercaya. Interpretasi atau penafsiran adalah tahap berikutnya yang penulis lakukan. Sintesis adalah jenis Interpretasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Tahap terakhir yang penulis lakukan adalah penulisan atau historiografi. Dalam penulisan sejarah aspek kronologi sangat penting, penulis menyusun fakta yang ditemukan menjadi tulisan yang lengkap (Kuntowijoyo, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, penulis berhasil menemukan bahwa bangsa asing turut serta dalam pembangunan wilayah Pontianak. Peradaban Pontianak dimulai pada tahun 1771, ketika Syarif Abdulrahman Alkadrie mulai menapakkan kaki di daratan sekitar persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Sekitar tahun 1775 Syarif Abdulrahman Alkadrie dinobatkan sebagai Sultan pertama Kesultanan Pontianak (Purwana et al., 2004). Syarif Abdulrahman Alkadrie berperan besar dalam masuknya bangsa asing ke wilayah Pontianak, sifatnya yang selalu ramah terhadap pendatang semakin memuluskan keinginan Belanda untuk menguasai Pontianak. Seluruh bangsa yang mendatangi Pontianak, baik dari wilayah Nusantara atau luar Nusantara diizinkan untuk datang dan pergi serta melakukan aktivitasnya di Pontianak, bila para pendatang ingin bermukim, Sultan Syarif Abdulrahman Alkadrie akan memberikan tempat. Namun para pendatang wajib membantu Kesultanan Pontianak bila terjadi hal genting seperti perang (Veth, 2012)

Pada tahun 1779 terjadi dualisme pemerintahan di wilayah Pontianak, yaitu Pemerintahan Tradisional dan Pemerintahan Kolonial. Pemerintahan Tradisional dipimpin oleh Sultan Pontianak, Istana Kesultanan Pontianak yang berada di daerah Kelurahan Dalam Bugis menjadi pusatnya. Pemukiman penduduk yang mayoritas beragama islam menjadi pemandangan yang menghiasi sekitar Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Sungai Kapuas menjadi pemisah Pemerintahan Tradisional dan Pemerintahan Kolonial. Pemerintahan Kolonial berada di seberang Sungai Kapuas, dipimpin oleh pejabat Belanda. Pada masa Hindia Belanda daerah tersebut dikenal sebagai wilayah Tanah Seribu atau *Duizend Vierkanten Paal*, lalu oleh masyarakat pribumi Pontianak dikenal sebagai Kampung Belanda. Saat ini wilayah Kampung Belanda menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat (Burn dalam Listiana, 2009)

Belanda gencar melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan Tanah Seribu. Pembangunan ini bertujuan untuk menunjang segala aktivitas kompeni selama di Pontianak. Sarana pertahanan, sarana ekonomi, dan sarana transportasi menjadi prioritas utama (Listiana, 2009). Pembangunan kawasan Tanah Seribu sempat berhenti karena VOC mengalami masalah dan akhirnya runtuh. Pembangunan mulai dilanjutkan ketika Syarif Kasim, Sultan kedua Pontianak mengundang Belanda untuk datang lagi ke Pontianak (Hasanuddin, 2014). Pembangunan infrastruktur di Tanah Seribu kembali dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Infrastruktur yang dibangun pada pusat kota kolonial umumnya adalah kanal dan jalan tanah yang pada masa lalu disebut dengan istilah Tembok. Selain itu beberapa fasilitas penunjang aktivitas masyarakat Belanda juga dibuat (Burn dalam Listiana, 2009)

Kawasan pemukiman kolonial didesain semirip mungkin dengan kampung halaman bangsa kulit putih, yaitu Negara Belanda. Namun mereka tetap memperhatikan ketersediaan bahan baku dan juga kondisi geografis kawasan yang akan mereka manfaatkan sebagai pemukiman. Beberapa

ciri khusus dari sebuah pusat pemerintahan kolonial adalah terdapat Taman Alun yang berfungsi sebagai sarana rekreasi warga Eropa, sekolah untuk anak-anak Eropa, kompleks perkantoran Belanda, tempat beribadah, dan rumah dinas pejabat Pemerintahan Hindia Belanda (Handinoto & Soehargo, 1996). Berdasarkan pengamatan penulis, di kawasan Tanah Seribu yang kini bagian dari wilayah Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat terdapat beberapa bangunan yang mewakili masa gaya awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 di Hindia Belanda yang kini menjadi Indonesia, memang tengah menjamur bangunan yang didesain dengan arsitektur Indis. Beberapa bangunan penting peninggalan Pemerintah Hindia Belanda di Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Bangunan Penting Peninggalan Pemerintah Hindia Belanda

No	Bangunan	Pengelola Saat Ini
1	Komplek perkantoran resident <i>Westerafdeeling van borneo</i>	Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak
2	Rumah Pejabat Pemerintah Hindia Belanda	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3	<i>Holland Indische School</i>	SDN 14 Pontianak
4	<i>de Javasche Bank</i> Pontianak	Bank Indonesia
5	<i>Post Telegraf Kantoor</i>	PT Pos Indonesia

Beberapa bangunan yang tercantum dalam Tabel di atas berdampak besar bagi Kota Pontianak pada masa awal kemerdekaan. Kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan bisa dikatakan kurang stabil. Masih banyak daerah yang bergejolak karena rakyat jelata lebih berpihak kepada Republik Indonesia sedangkan kaum bangsawa di Nusantara lebih memilih bersama dengan Belanda (Putra, 2023). Pada tahun 1949, Kalimantan Barat resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Purwana et al., 2004). Pemerintah Kota Pontianak langsung memanfaatkan bangunan peninggalan Hindia Belanda untuk menjalankan roda pemerintahan. Tentunya hal ini sangat membantu pemerintah Indonesia karena dapat menghemat pengeluaran negara Indonesia dalam hal membangun fasilitas. Bahkan beberapa bangunan yang tercantum dalam tabel diatas sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh pemerintah Kota Pontianak karena memiliki nilai penting bagi sejarah.

Pembahasan

Berdasarkan pengamatan penulis, Kecamatan Pontianak Kota dapat dikatakan sebagai pusat Kota Pontianak pada masa Hindia Belanda hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Roda pemerintahan Kota Pontianak berputar di wilayah Kecamatan Pontianak Kota. Insfrastruktur yang dibangun oleh Pemerintahan Hindia Belanda adalah salah satu penyebab dipilihnya wilayah Kecamatan Pontianak Kota sebagai pusat Pemerintahan Kota Pontianak. Wilayah Kecamatan Pontianak Kota terdapat beberapa bangunan penting seperti sekolah pertama di Kota Pontianak, gedung Balai Kota Pontianak pertama, rumah pejabat, Bank Pertama di Kalimantan Barat, dan kantor pos pertama di Pontianak. Semua bangunan tersebut mengandung nilai sejarah. Sebelum memahami sejarah dari bangunan tersebut perlu terlebih dahulu mengetahui sejarah Kota Pontianak agar mempermudah proses pemahaman peristiwa lampau.

1. Sejarah Kota Pontianak

Penyebaran agama Islam di Kalimantan Barat diyakini datang dari daerah pedalaman yang disebarkan oleh para pedagang, baik pedagang dari Sarawak maupun pedagang dari daerah pedalaman Kalimantan Barat. Terdapat pula rombongan para ulama agama Islam di

antara para pedagang tersebut, yang memiliki tujuan untuk menyampaikan dakwah mereka. Agama Islam kemudian semakin menyebar luas di Kalimantan Barat. Tidak sedikit pula wilayah-wilayah kerajaan yang penduduk dan juga pemimpinnya menganut agama Islam. Kemudian, Kesultanan Pontianak menjadi kerajaan terakhir yang berdiri dengan pengaruh Islamnya. Seperti yang telah kita ketahui, tahun 1771 merupakan tahun pendirian Kota Pontianak yang sejalan dengan dibangunnya Masjid Sultan Abdurrahman. Pendirian masjid tersebut kemudian menjadi awal permulaan dibukanya permukiman di tanah tersebut. Diketahui pula, bahwa pendiri dari masjid itu adalah Syarif Abdurrahman Alkadri yang merupakan putra Alhabib Husein, seorang ulama besar yang menurut sejarahnya berasal dari penduduk Kota Trim Hodralmaut negeri Arab (Ajsman, 1998)

Letak wilayah Pontianak yang strategis membuat wilayah ini menjadi magnet bagi pedagang-pedagang lokal dan asing untuk datang dan menetap di Pontianak sembari mendirikan perkampungan di sana, seperti Bugis, Melayu, Cina, Sanggau, Sukadana Mempawah, dan Sambas (Firmansyah, 2021a). Sehingga terciptalah keberagaman etnis di Pontianak, perkampungan-perkampungan tersebut juga masih berdiri di Pontianak hingga sekarang. Semenjak banyak masyarakat yang mendiami Pontianak, kegiatan di pelabuhan juga semakin ramai. Komoditi perdagangan yang dihasilkan Pontianak juga menjadi faktor mengapa banyak pedagang-pedagang yang kemudian memilih untuk menetap di Pontianak, komoditi yang dihasilkan berupa lada, kopra, kelapa, rotan, tengkawang, sarang burung, gambir, pinang, lilin, sagu, dan juga hasil pertambangan seperti emas dan instan (Poeponegoro, et al., dalam Purwana et al., 2004). Tak hanya menarik perhatian masyarakat-masyarakat yang telah disebutkan sebelumnya, dengan dibukanya jalur perdagangan di Pontianak juga menarik perhatian VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Kalimantan Barat. Meskipun sebenarnya VOC telah lama memiliki hubungan perdagangan dengan Sukadana dan Sambas, namun mereka tetap ingin memperkuat pengaruhnya di daerah yang perdagangannya sedang berkembang dan naik (Veth, 2012).

Pada perkembangannya, VOC kemudian membawa pengaruh yang besar dalam mengubah keadaan politik dan juga ekonomi di Kerajaan Pontianak. Tepat tanggal 5 Juli 1779 VOC membuat perjanjian dengan Kerajaan Pontianak untuk mendapatkan hak monopoli perdagangan dan politik mereka. alat transaksi dagang di Kota Pontianak kemudian beralih menggunakan mata uang semenjak diberlakukannya perjanjian tersebut. (Purwana et al., 2004). Perjanjian 5 Juli 1779 juga berdampak pada proses terbentuknya *Duizen Vierkanten Paal* yaitu istilah dalam bahasa Belanda untuk menyebut tanah 1000. Tanah ini merupakan pemberian dari Sultan Pontianak kepada VOC di wilayah selatan Istana yang dibatasi oleh Sungai Kapuas. Disebut dengan tanah 1000 dikarenakan tanah ini meliputi areal 1000x1000 meter untuk dijadikan tempat pendudukan Belanda. Seperti halnya yang dilakukan oleh VOC kepada wilayah jajahannya, di Pontianak VOC juga membangun benteng yang kemudian dinamakan "*fort Mariannen*" sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan mereka di Pontianak (Firmansyah, 2021). Dengan masuknya Kolonial Hindia Belanda ke Pontianak, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan oleh pihak Hindia Belanda dan sejak saat itu wilayah Pontianak juga didominasi oleh bangunan-bangunan kolonial.

Hingga tahun 1791 VOC mengalami kemunduran, menutup seluruh kantor dagangnya di Borneo Barat akibat kas VOC yang menurun dikarenakan banyaknya pegawai-pegawai VOC yang korupsi serta penyelundupan barang. Dampak dari ditutupnya kantor dagang VOC di wilayah Borneo Barat menyebabkan perdagangan di Pontianak mulai sepi, Adapun faktor-faktor lain yang juga menjadi penyebab sepi perdagangan di Pontianak seperti adanya bajak laut di pantai Borneo Barat, perang antara Inggris dan Belanda, dan adanya perdagangan yang lebih menarik di Pulau Pinang (Veth, 1854). Tidak lama berselang, pada tahun 1811 wilayah Pontianak kemudian diambil alih oleh Inggris untuk memulihkan perekonomian di Pontianak. Setelah perekonomian berangsur-angsur membaik, tahun 1816 Inggris kemudian mengembalikan

wilayah Pontianak kepada Kerajaan Belanda sehingga perjanjian baru antara pihak kesultanan dan pemerintah Belanda pun dimulai kembali.

Pada tahun 1834, Pelabuhan di Pontianak mulai ramai dikunjungi kembali dan Pontianak mendapati kemajuan besar dikarenakan Pelabuhan kapal-kapal dagang milik kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Meskipun demikian, Pihak Belanda memperketat peraturan dengan memberikan pajak ekspor dan impor yang tinggi. Dengan berkembang pesatnya Pontianak, pembangunan-pembangunan infrastruktur juga didominasi oleh arsitektur kolonial. Kawasan Tanah Seribu yang telah disepakati dalam perjanjian dulu, kini mulai dikembangkan pada tahun 1919-1942. Rumah Residen dan kantor Residen, awalnya terletak di Heeren Straat (sekarang Jalan Zainuddin), menjadi pusat kompleks perkantoran Pemerintah Hindia Belanda. Kompleks tersebut melibatkan berbagai fasilitas, termasuk kantor polisi reserce, kantor pajak, kantor pertanahan, kantor pemungut pajak, kantor pengadaan air daerah, kantor kontrolir, kantor pengawas pertanian, kantor sekretaris keresidenan, kantor keresidenan, Javasche Bank, kantor pos dan telegraf, kantor kehutanan, kantor telepon, dan kantor transportasi di sekitar pelabuhan, serta pusat pertahanan angkatan bersenjata di Benteng Du Bus. Peningkatan jumlah penduduk Eropa di Pontianak mendorong Pemerintah Keresidenan untuk meningkatkan fasilitas publik, termasuk pembangunan sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan tempat hiburan. Bangunan yang dibuat oleh Belanda di wilayah tanah seribu dibuat semirip mungkin dengan bangunan yang ada di Belanda. Namun, bangunan-bangunan ini juga telah disesuaikan dengan kondisi iklim di Pontianak. Namun, bangunan-bangunan yang telah dibuat oleh Belanda ini beberapa telah mengalami kerusakan akibat adanya serangan dari Jepang pada tanggal 19 Desember 1941.

Pada tahun 1941 terjadi serangan militer Jepang di Pontianak. Serangan tersebut berupa penjatuhan bom di wilayah Tanah Seribu, serangan ini menewaskan 150 warga sipil. Tentara Belanda tidak mampu menghadapi militer Jepang karena Kerajaan Belanda diduduki Jerman sejak tahun 1940 dan masyarakat pribumi tidak mendukung Belanda. Jepang berhasil mengambil alih Pontianak pada tanggal 2 Februari 1942. Tentara Belanda di Pontianak melarikan diri ke arah Hulu Sungai Kapuas. Pasukan Jepang memasukan orang Belanda di Pontianak ke penjara, ada juga yang menjadi tahanan rumah dan ada yang langsung dibunuh. Masyarakat Tionghoa melarikan ke hulu Sungai Kapuas, ada juga yang bertahan hidup di kebun karet dan ladang mereka. Pada Agustus 1942 Jepang menerapkan kebijakannya di Pontianak, seperti menerapkan sistem pemerintahan Jepang, menutup sekolah Belanda, melarang kegiatan organisasi, media massa dikontrol Jepang, dan orang Belanda diasingkan ke Kuching (Firmansyah et al., 2022).

Beberapa kebijakan Jepang cukup memberatkan masyarakat Pontianak, seperti kebijakan *Seikerei*. Kebijakan ini mewajibkan penduduk Pontianak untuk menundukan kepala dan badan ketika bertemu dengan tentara Jepang dan ketika matahari terbit. Pada masa pendudukan Jepang, disekitar Taman Alun Kapuas terdapat tempat bernama *Yasukuni Jinja*. Tempat tersebut selalu dijaga oleh tentara Jepang sehingga siapapun yang melawati *Yasukuni Jinja* wajib berhenti dan melakukan *Seikerei*, jika melanggarnya akan dipukuli. Pada 1943, Jepang membentuk rumah bordil, Wanita pribumi dan Tionghoa direkrut sebagai pasukan pemuas nafsu. Kebutuhan pokok seperti sembako semakin langka karena Jepang menutup impor.

Puncak kekejaman Jepang terjadi pada tahun 1944, dikenal sebagai Peristiwa Mandor. Peristiwa ini bermula ketika Jepang khawatir masyarakat Kalimantan Barat akan memberontak seperti di Kalimantan Selatan. Sehingga sejak 23 Oktober 1943 Jepang melakukan penangkapan para raja, tokoh masyarakat, cendekiawan di Kalimantan Barat. Nasib korban penangkapan Jepang baru diketahui tahun 1944. Melalui koran Borneo Shinbun edisi 1 Juli 1944 termuat berita bahwa mereka yang diculik dianggap akan memberontak kepada Jepang sehingga mendapat hukuman mati. Beberapa tokoh masyarakat Pontianak yang menjadi korban adalah Syarif

Muhammad Alkadri (Sultan Pontianak), dr. Roebini (Kepala RS Umum Pontianak), dr. R.M Agoesdjani (Pegawai RS Umum Pontianak), dr. Soenarjo Martowardjojo (Kepala RS Jiwa Pontianak), dan masih banyak lagi (Prabowo, 2019).

Pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, berita proklamasi terlambat sampai ke telinga masyarakat Pontianak karena jumlah radio yang terbatas. Masyarakat prorepublik berpendapat jika Kesultanan Pontianak harus bersatu dengan Republik Indonesia sehingga terbentuk organisasi Pemuda Penyongsong Republik Indonesia (PPRI). PPRI Pontianak menyebarkan berita kemerdekaan RI melalui telegram dan telepon. Suasana Pontianak masih mencekam, tentara Jepang masih bersiaga. Tentara Australia atas nama Sekutu diboncengi NICA datang kembali ke Pontianak untuk membentuk kembali kekuasaan Belanda. PPRI menyatakan Kalimantan Barat adalah bagian dari Republik Indonesia, Asikin Nour diangkat menjadi Residen Republik Indonesia Kalimantan Barat.

Asikin Nour melakukan penghianatan, dia menyerahkan jabatan Residen kepada Dr. Van der Zwaal, kekuasaan NICA di Pontianak dan Kalimantan Barat kembali berdiri. NICA mengangkat Syarif Hamid II Alqadrie sebagai Sultan Pontianak. Sultan Hamid II lebih condong kepada Belanda. Masyarakat sipil Pontianak mendukung Republik Indonesia sedangkan kaum bangsawan menolak. Pada 1 Oktober 1946 Kesultanan Pontianak mengangkat R. Soepardan sebagai Syahkota. Tugasnya adalah mengamankan aset pemerintah kolonial dan membuat aturan yang selaras dengan Kesultanan Pontianak. Pada 12 Mei 1947 NICA membentuk Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB). Pembentukan DIKB dikecam organisasi GAPI (Gabungan Persatuan Indonesia) (A. Firmansyah et al., 2022)

Pada masa DIKB Pontianak menjadi pusat pemerintahan dan belum bergabung dengan Indonesia. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar pada 1949, Belanda mengakui Indonesia negara merdeka, penyerahan kedaulatan Indonesia dilakukan di Pontianak 27 Desember 1949. Pontianak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950. Status Pontianak pada tahun 1951 menjadi Kota Administratif, pengangkatan Wali Kota masih diatur oleh pihak Kesultanan Pontianak namun dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mohammad Roem (Purwana et al., 2004). Pada masa awal kemerdekaan, Pemerintah Kota Pontianak belum mampu membangun infrastruktur yang memadai sehingga bangunan-bangunan peninggalan Belanda dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Beberapa bangunan tersebut adalah kompleks Perkantoran Resident *Westerafdeeling van borneo*, gedung *Landschaps Telefoon Kantoor*, gedung *Holland Indische School*, gedung *de Javasche Bank* Pontianak, dan gedung *Post Telegraf Kantoor*.

2. Bangunan Peninggalan Belanda di Pontianak

- Gedung *de Javasche Bank* Pontianak

De Javasche Bank (DJB) adalah bank sirkulasi di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1828. Awalnya bank ini hanya berwilayah kerja di Jawa dan Madura, namun seiring berkembangnya perekonomian dan pembangunan daerah di luar Pulau Jawa, maka cabang DJB diperluas lagi hingga ke Pulau Kalimantan. *De Javasche Bank Agentschap* Pontianak merupakan kantor cabang ketiga di luar Pulau Jawa setelah Padang dan Makassar sekaligus merupakan cabang *de Javasche Bank* pertama yang ada di Pulau Kalimantan (Krisdiana et al., 2019)

Kantor *de Javasche Bank* Pontianak dibuka pada tanggal 1 April 1906, pada saat pelaksanaan Oktroi kedelapan (Pedoman bagi DJB dalam menjalankan usahanya) Kemudian di tahun 1922, Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-undang *de Javasche Bankweer* yang menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi yang bertugas sebagai sarana pelayanan pemerintah tanpa pungutan biaya serta bertugas sebagai perantara pemerintah ketika ingin menerbitkan uang kertas atau obligasi perbendaharaan negara. Dengan adanya

kebijakan Bankweer 1922, bangunan lama dari DJB ini kemudian dibongkar pada tanggal 22 April 1926 dan dibangun kembali. De Javasche Bank Pontianak sendiri berlokasi di Larive Park No. 3 atau yang sekarang dikenal dengan Jalan Rahadi Oesman (Asma dZ, 2013).

Dalam laporan *Verslag van den President van de Javasche Bank en van den Raad van Commissarissen* (1936), pembangunan gedung-gedung De Javasche Bank di Hindia Belanda dimulai sejak tahun 1910, ditangani agensi Arsitek Ed. Cuypers en Hulswit. Sehingga diyakini juga perancang pembangunan Gedung de Javasche Bank di Pontianak pada tahun 1926 adalah arsitek yang sama, yaitu Ed. Cuypers dan A.A. Fermont (Krisdiana et al., 2019) Bangunan de Javasche Bank yang diranca n g oleh Ed. Cuypers mengadaptasi aliran Amsterdam School yang mengutamakan orisinalitas dan spiritualitas hal ini dapat terlihat pada penggunaan *balustrade* pada balkon depan bangunan, jendela panjang arah vertikal, beberapa *moulding* pada aksesoris pintu jendela dan masih banyak lagi.

Pengaruh Amsterdam School pada bangunan de Javasche Bank sudah tidak murni lagi. Gaya arsitektur yang terdapat dalam Gedung de Javasche Bank Pontianak juga telah disesuaikan dengan kondisi iklim di Pontianak. Pada tahun 1953, de Javasche Bank Pontianak berganti menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Pontianak. Tidak didapati perubahan pada bangunan ini setelah menjadi Kantor Cabang Bank Indonesia Pontianak. Hingga tahun 1976, gaya arsitektur bangunan mengalami perkembangan dengan mengadaptasi aliran arsitektur modern yang menekankan pada bentuk dan aspek fungsional. Arsitektur kolonial yang masih bertahan pada bangunan Bank Indonesia Pontianak adalah Ruang Khazanah yang memiliki akses terbatas untuk dimasuki. Pada tahun 2011, Bangunan Bank Indonesia Pontianak yang berada di Jalan Rahadi Oesman tidak lagi difungsikan menjadi kantor Bank karena dianggap sudah tidak kondusif dan memiliki keterbatasan untuk pengembangannya. Sehingga, dibangun Gedung baru yang berada di Jalan Ahmad Yani yang berdekatan dengan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Hingga saat ini, Gedung lama Bank Indonesia Pontianak difungsikan sebagai Gedung Pelatihan dan Pengembangan Inkubator Bisnis UMKM.

- Gedung *Post Telegraf Kantoor* (Kantor Pos Lama)

Sebelum abad ke-21, masyarakat berkirim pesan melalui surat memanfaatkan jasa pos. Indonesia mulai mengenal sistem pos modern ketika *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau VOC menduduki wilayah Nusantara, pada abad ke-18. Pengirim hanya meletakkan surat atau pakatnya di gedung penginapan kota, kemudian penerima mencari sendiri surat atau paket miliknya (Aji, 2017). Kantor pos pertama berdiri pada tanggal 17 Agustus 1746 di Batavia. Gubernur Jendral G.W. Baron ingin arus surat menyurat semakin lancar, namun pos modern baru diterapkan di Pulau Jawa Saja. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu abad ke-19, pos berstatus Jawatan atau perusahaan yang berdiri sendiri (Wirjono, 2017)

Pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di Pontianak membuat kantor pos pada tahun 1858. Kantor ini berada di simpang *Heerenstraat* atau kini Jalan Zainudin, berdekatan dengan bangunan *de Javasche Bank* Pontianak dan bundaran *Plain Resident Kater* yang kini menjadi tugu pancasila. Sejak awal berdiri hingga saat ini, bangunan ini selalu difungsikan sebagai kantor pos (Asma dZ, 2013). Diduga perubahan hanya terjadi pada nama kantor, menyesuaikan penambahan fungsi karena perkembangan teknologi. Umumnya perubahan fungsi sebuah instansi akan mengikuti perubahan yang terjadi di pusat pemerintahan. Seperti ketika penggunaan telegraf sebagai media pengirim pesan mulai berkembang dikalangan masyarakat pada pertengahan abad ke-19. Menyikapi hal tersebut, pada tahun 1875 Pemerintah Hindia Belanda menggabungkan Dinas Pos dan Dinas Telegraf.

Post Kantoor berubah nama menjadi *Post en Telegraaf Dienst Kantoor*. *Post en Telegraaf Dienst* atau Pelayanan Pos dan Telegraf bekerja di bawah naungan *Departement der Burgerh'jkke Openbae Werkn* atau Departemen Pekerjaan Umum (Wirjono, 2017). Ketika Jepang menguasai Hindia Belanda fasilitas yang dibangun Belanda diambil alih oleh Jepang, namun fungsinya tetap sama hanya nama yang berubah. Kantor Pelayanan Pos dan Telegraf berubah nama menjadi *Kokusai Denki Tsusinkyoku* dan dikelola oleh perusahaan swasta. Kantor *Kokusai Denki Tsusinkyoku* tidak lagi menjadi layanan publik, mereka hanya digunakan untuk lalu lintas berita dan pesan militer Jepang (Aji, 2017). Gedung berarsitektur Eropa yang dibangun oleh Belanda menjadi pusat kegiatan Kantor Pos Pontianak berlangsung. Pada tahun 1980 gedung yang berlokasi di Jalan Rahadi Usman ini sudah tidak memadai, sehingga manajemen Kantor Pos Pontianak memindahkan kantor pusatnya ke gedung baru yang berlokasi di Jalan Sultan Abdurrahman. Kantor Pos Pontianak yang lama difungsikan sebagai kantor bagian logistik karena pengguna jasa ini tidak terlalu banyak (Hartati, 2006).

- Gedung *Landschaps Telefoon Kantoor* (Bekas Kwarda Kalbar)

Bangunan ini sudah berdiri pada abad ke-20. Berdasarkan *Platte Grond Van De Hoofdplaats Pontianak* 1934 atau peta Pontianak tahun 1934 bangunan ini diberi tanda nomor 26. Pada legenda peta tersebut nomor 26 adalah *Landschaps Telefoon Kantoor*. Diduga pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Pontianak bangunan ini berfungsi sebagai kantor yang melayani telepon. Pada awal abad ke-20 telepon mulai berkembang di Hindia Belanda sehingga Pemerintah Hindia Belanda mendirikan layanan telepon (Ahmad et al., 2011). Bangunan ini berada di kompleks perumahan pejabat Hindia Belanda, tepatnya di *Heerenstraat* atau kini menjadi Jalan Zainudin. Ada dugaan bahwa bangunan ini juga pernah berfungsi sebagai rumah pejabat Belanda (Asma dZ, 2013). Orang Belanda memanfaatkannya sebagai tempat beristirahat (H.Firmansyah, 2021).

Pada 14 Oktober 1945 ketika tentara Australia atas nama Sekutu datang ke Pontianak dengan tujuan melucuti senjata Jepang dan mengadili tentara Jepang. Kedatangan tentara Sekutu ternyata diboncengi oleh NICA (Nederlandsch Indische Civiele Administratie). NICA memiliki tujuan yang berbeda dengan tentara Australia, Belanda berusaha kembali menanamkan kekuasaannya di Pontianak (A. Firmansyah et al., 2022). Para pejuangan di Pontianak menentang keinginan Belanda, bangunan ini pernah dijadikan tempat pertemuan para pejuang dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia (Asma dZ, 2013). Pada tahun 1947, Persatuan Buruh Indonesia (FBI) menggunakan bangunan ini sebagai markasnya. Ketika Kalimantan Barat bergadung dengan NKRI tahun 1950, bangunan ini beralih fungsi sebagai Markas Komando Daerah Angkatan Kepolisian. Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga sempat menggunakan bangunan ini. Pada akhir tahun 1980 hingga tahun 2022, bangunan ini difungsikan sebagai kantor Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Barat. Saat ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Barat menjadi pemilik bangunan ini (Tim Disbudpar Pontianak, 2016).

- Komplek Perkantoran Resident *Westerafdeeling van borneo* (Bappeda Kota Pontianak)

Bangunan Bappeda merupakan salah satu bangunan bersejarah yang juga mengadaptasi arsitektur pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini diperkirakan telah berdiri sekitar abad 19-20. Awalnya bangunan ini merupakan bangunan Balai Kota di Pontianak yang berada di areal kompleks Jalan Heerenstraat atau sekarang dikenal dengan Jalan Zainuddin (Asma dZ, 2013). Jika merujuk pada *Platte Ground van de Hoofdplaats*

Pontianak (Peta Pontianak 1934) bangunan Bappeda/Balai Kota ini belum berdiri. Namun, lokasi dimana akan berdirinya bangunan ini berada di antara Kantor Pol. Recherche dan Kantor Boschwezen. Bangunan-bangunan tersebut kini telah menjadi tempat berdirinya Kantor Satpol PP Kota Pontianak. Fungsi bangunan dari awal dibangun hingga saat ini masih sama. Bangunan ini masih digunakan sebagai bangunan perkantoran.

Bangunan ini berjenis rumah panggung bertiang kayu dengan denah berbentuk huruf "W" dengan panjang bangunan ±30 m. Bangunan Bappeda menghadap ke arah timur. Bangunan Bappeda menggunakan atap sirap berbahan kayu berbentuk pelana dengan kemiringan yang curam dengan puncak atapnya yang menyerupai gada. Lantai bangunan berbahan papan kayu ulin berwarna coklat tua yang disusun melintang. Dinding pada bangunan berwarna putih dengan tiang yang berwarna coklat. Bagian utama yang digunakan sebagai penyangga dinding berbahan kayu dengan penutup dinding terbuat dari campuran pasir dan kapur yang digunakan sebagai bahan plester atau lapisan permukaan untuk memberikan kekuatan dan tampilan tertentu pada dinding dengan rangka dari plat persegi panjang berbahan besi yang disusun menyilang. Pintu dan jendela pada bangunan menggunakan kusen kayu dan daun jendela berbahan kayu dan kaca. Jendela berupa jendela sayap ganda. Pintu berupa pintu sayap ganda berbahan kayu dengan jendela dibagian atasnya.

Pada bagian depan bangunan, terdapat 3 buah anak tangga sebelum memasuki pintu utama. Pada bagian barat tegak lurus dengan pintu masuk, terdapat sebuah aula yang diberi nama "Rohana Mutholib" sedangkan di sisi kiri dan kanan terdapat selasar yang memanjang. Bangunan dari kantor Bappeda sendiri sangat luas, diperkirakan bangunan ini memiliki 18 ruangan. Pada bagian belakang bangunan terdapat selasar yang berfungsi sebagai penghubung antar ruang. Selasar ini memiliki atap yang menyatu dengan atap utama. Pada bagian dinding pelana di bangunan belakang memiliki ornamen bermotif floralistik

- Gedung *Holland Indische School* (SDN 14 Pontianak Kota)

Pada awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan kebijakan *Ethische Politic* atau Politis Etis. Politik Etis dapat diartikan sebagai upaya balas budi Belanda kepada rakyat Indonesia atas desakan orang-orang Belanda yang prihatin terhadap kondisi pribumi. Mereka menganggap bahwa pribumi Indonesia adalah pahlawan bagi Kerajaan Belanda, sehingga Belanda wajib membalas jasa pribumi. Belanda resmi melaksanakan Politik Etis pada September 1901 meski tanpa keikhlasan hati. Kerajaan Belanda melalui Pemerintah Hindia Belanda menerapkan tiga program dalam kebijakan Politik Etis, yaitu irigasi atau pengairan, emigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi atau pendidikan (Hasanuddin, 2014).

Penerapan program ini hampir diseluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk Pontianak. Terdapat satu bangunan peninggalan Belanda yang cukup erat kaitannya dengan kebijakan Politik Etis program pendidikan, yaitu bangunan *Holland Indische School*. *Holland Indische School* atau biasa disingkat dengan HIS adalah sekolah setingkat Sekolah Dasar pada masa sekarang (Rahmah et al., 2022). Bangunan yang diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1918 ini berlokasi di Jalan Muntinghe, Kampung Mariana, Tanah Seribu atau saat ini dikenal dengan nama Jalan Tamar, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada tahun 1921 penerimaan peserta didik dibuka, kegiatan belajar mengajar yang efektif baru dimulai tahun 1922. *Holland Indische School* Pontianak adalah jenis sekolah kelas satu dengan lama pendidikan 6 tahun. Maksud dari sekolah kelas satu adalah sekolah yang hanya diperuntukan bagi kaum bangsawan dan golongan terkemuka. Menir

Van Dellen adalah kepada sekolah yang pertama, sekolah ini didominasi oleh anak-anak Eropa. Bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar ketika kegiatan belajar mengajar di HIS. Ilmu pengetahuan yang diberikan menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak pribumi namun pelajaran sejarah tidak diberikan karena bersifat sensitif. Pada tahun 1934 durasi belajar di HIS bertambah menjadi 7 tahun karena pihak guru merasa jam untuk memberikan pelajaran kurang.

Pada tahun 1941, sekolah ini sempat ditutup karena Jepang menyerang pemukiman Belanda di Pontianak. Ketika Jepang berhasil menguasai Pontianak, segala aktivitas kompeni berhenti. HIS sempat ditutup sementara, kemudian dibuka kembali dengan nama *Kokumin Gakko* atau Sekolah Rakyat (Andhini, 2013). Belum ditemukan informasi bagaimana keadaan dan fungsi bangunan pada masa Daerah Istimewa Kalimantan Barat berdiri. Pada tahun 1950, ketika Kalimantan Barat mulai bergabung dengan Indonesia bangunan ini resmi menjadi sekolah yang diperuntukan semua golongan (Asma dZ, 2013).

Pada tahun 1956 pemerintah Indonesia mengubah nama sekolah ini menjadi Sekolah Dasar Negeri 26. Pada tahun 1775, gedung bekas HIS ini difungsikan untuk kegiatan operasional dua sekolah, yaitu Sekolah Dasar Negeri 26 dan Sekolah Dasar Negeri 46. Perubahan nama sekolah kembali dilakukan pemerintah pada tahun 1984, Sekolah Dasar Negeri 26 diubah menjadi Sekolah Dasar Negeri 14 yang hingga kini digunakan, sedangkan Sekolah Dasar Negeri 46 dipindahkan (Hartati, 2006). Sejak awal berdiri bangunan ini tidak mengalami perubahan bentuk. Renovasi pernah dilakukan pada tahun 1990 dan 2008 untuk mengganti atapnya dan mencatat ulang bangunan (Andhini, 2013).

Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 591.1/DISDIKBUD/TAHUN 2021 Tentang Cagar Budaya Kota Pontianak, bangunan bekas *Holland Indische School* yang saat ini dikelola oleh SDN 14 Pontianak Kota ditetapkan sebagai Cagar Budaya kategori bangunan. Panjang bangunan 59 M, lebar 12,22 M, dan total luas bangunannya adalah 720,98 m². Berdasarkan pengamatan penulis, desain bangunan ini adalah arsitektur Indis. Pengaruh arsitektur kolonial terlihat pada jendela susun sirih atau jalusi berukuran besar, dua tiang di ujung atapnya, plafon bangunan tinggi, dan pagar bermotif geometri. Sedangkan pola arsitektur tradisional terlihat pada bentuk atap tumpang dua yang berbahan sirap, konstruksi bangunan berbentuk rumah panggung panjang dan bertangga. Atap tumpang dua mengadopsi arsitektur bangunan di Pulau Jawa sedangkan konstruksi rumah panggung dan bentuk bangunan yang memanjang mengadopsi arsitektur rumah adat masyarakat Dayak dan Melayu.

PENUTUP

Peradaban di Pontianak mulai terbentuk pada abad ke-18 ketika Nusantara memasuki masa Kerajaan Islam. Syarif Abdurrahman Alkadrie mendirikan sebuah pemerintahan di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, pemerintahan tersebut bernama Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak bukanlah satu-satunya pemerintahan yang mengembangkan wilayah Pontianak. Bangsa Belanda juga turut serta dalam membangun wilayah Pontianak. Ketika Belanda atas nama VOC datang, Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie memberikan izin kepada Belanda untuk menetap di Pontianak. Mereka mendirikan basisnya di wilayah Tanah Seribu atau *Duizend Vierkanten Paal*, saat ini menjadi bagian Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Barat. Belanda gencar melakukan pembangunan di wilayah tersebut, namun sempat berhenti pada akhir abad ke-18 karena VOC runtuh. Pembangunan kembali dilakukan pada abad ke-19 ketika Belanda datang atas nama Pemerintah Hindia Belanda. Belanda mendesain pemukiman mereka semirip mungkin dengan pemukiman di Belanda. Terdapat kanal untuk

mengatasi banjir dan jalur transportasi air, Taman Alun yang berfungsi sebagai sarana rekreasi warga Eropa, sekolah untuk anak-anak Eropa, kompleks perkantoran Belanda, tempat beribadah, dan rumah dinas pejabat Pemerintahan Hindia Belanda.

Tidak mengherankan bila disekitar Kecamatan Pontianak Kota dapat ditemukan bangunan-bangunan dengan arsitektur Indis atau bangunan yang didesain dengan mencampurkan seni bangunan Eropa dan bangunan Tradisional (Melayu). Beberapa bangunan tersebut sangat berjasa bagi Pemerintah Kota Pontianak pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi Indonesia yang belum stabil tentunya sangat sulit untuk membangun infrastruktur. Pemerintah Kota Pontianak memanfaatkan beberapa bangunan peninggalan Belanda untuk menjalankan roda pemerintahan. Seperti penggunaan kompleks perkantoran Resident *Westerafdeeling van borneo* sebagai Balai Kota Pontianak, penggunaan gedung *de Javasche Bank* sebagai Bank Indonesia Cabang Pontianak, penggunaan gedung *Post Telegraf Kantoor* sebagai kantor Pos, penggunaan gedung *Telefoon Kantoor* sebagai Markas Komando Daerah Angkatan Kepolisian, dan penggunaan gedung *Holland Indische School* sebagai sekolah. Keberadaan bangunan-bangunan tersebut menyebabkan pusat Kota Pontianak berada di Kecamatan Pontianak Kota. Infrastruktur tersebut masih digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia, bahkan beberapa diantaranya ada yang sudah berstatus sebagai Cagar Budaya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa asing (Belanda) turut serta dalam membentuk sejarah dan kebudayaan Kota Pontianak serta berperan dalam membentuk pusat Kota Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I., Novianto, K., Basundoro, P., Effendy, B., Irawan, T. T., Ansari, T. S., Nurbawono, A., & Ahsanto, N. (2011). *Melayani Rakyat Menjaga Negara Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia (Persero)* (I. Ahmad, Ed.). Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia, dan PT Pos Indonesia (Persero).
- Aji, Y. W. (2017). Perkembangan Pt. Pos Indonesia Tahun 1961-1995. *Risalah*, 4(1). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/risalah/article/view/9466>
- Ajisman. (1998). *Perkembangan Agama Islam di Kotamadya Pontianak (Pada Akhir Abad 20)* (J. Musa, Ed.). Kalimantan Barat : BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PTK., 1997/1998.
- Andhini, E. S. (2013). Peran Holland Inlandsche School (HIS) Dalam Pendidikan Kota Pontianak Tahun 1922-1941. *Skripsi Sarjana, STKIP-PGRI, Pontianak*.
- Asma dZ, A. (2013). *Pontianak Heritage dan Beberapa yang Berciri Khas*. Pontianak: Literer Khatulistiwa.
- Atmodjo, J. S., Ashari, C., Bismantara, K., Safei, Pasariu, Y. A., Hadi, A., Prasetyo, D., & Nugroho, Y. A. (2023). Modul Ajar Pendataan Cagar Budaya. Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek.
- Firmansyah, A., Andi, U. F., Mirzachaerulsyah, E. (2022). *Sejarah Berdirinya Kota Pontianak Masa kesultanan, Kolonial Hingga Kemeridekaan*. Pontianak: Untan Press.

- Firmansyah, H. (2021). Colonial Town Pontianak: Proses Terbentuk dan Perkembangannya pada Masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Tahun 1779-1791. *Artefak*, 8, 111–118.
- Firmansyah, H. (2021). *Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Area Duizen Vierkanten Paal Kota Pontianak sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah*. 1, 15–28. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3554>
- Firmansyah, H. (2021). Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Area Duizen Vierkanten Paal Kota Pontianak sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 5(1), 15-28. <https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3554>
- Hagijanto, A. D. (2022). Museum Reenactor Arek Ngalam: Simulakra Sejarah Perjuangan Menuju Nasionalisme. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana*, 22(2), 115-128. <https://doi.org/10.9744/nirmana.22.2.115-128>
- Handinoto & Soehargo, P. H. (1996). *Perkembangan kota & arsitektur kolonial Belanda di Malang*. Yogyakarta: Andi.
- Hartati, S. (2006). *Peta Sejarah dan Budaya Kalimantan*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Hasanuddin. (2014). *Pontianak Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Krisdiana, R., Usman, S., Andi, U. F., Akbar, A., & Wibawa, M. A. (2019). *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat* (Nawiyanto, Ed.). Bank Indonesia Institute.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Listiana, D. (2009). *IBUKOTA PONTIANAK 1779 - 1942 (Lahir dan Berkembangnya Sebuah Kota Kolonial)*. Pontianak: BPSNT.
- Prabowo, M. R. (2019). Peristiwa Mandor 28 Juni 1944 Di Kalimantan Barat: Suatu Pembunuhan Massal Di Masa Penduduk Jepang. *BIHARI: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH*, 2(1). <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/bihari/article/view/868>
- Purwana, B., Hasanuddin, Sulistyorini, P., & Asnaini. (2004). *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak Dari Masa Ke Masa*. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Putra, A. S. (2023). *Lembaran Berdarah Sejarah Indonesia*. PT. Neosphere Digdaya Mulia.
- Rahmah, K. N., Firmansyah, A., & Firmansyah, H. (2022). Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah pada Kelas XI SMA Islam Bawari. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4019-4030. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3616>
- Tim Disbudpar Pontianak. (2016). *Buku Pendataan Cagar Budaya Kota Pontianak*. Pontianak: Disbudpar Kota Pontianak.

- Tutuko, P. (2003). Ciri khas arsitektur rumah Belanda (studi kasus rumah tinggal di Pasuruan). *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 4(1). <https://doi.org/10.26905/mintakat.v4i1.1954>
- Veth, P. J. (2012). *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis Jilid 1, Terjemahan Borneo's wester- Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands a.b P.O.C.Yeri.* (Vol. 1). Institut Dayakologi.
- Wirjono, L. V. (2017). Elemen-Elemen Arsitektural Post Kantor di Tanah Deli. *Prosiding Seminar Heritage Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia*, 295-302. Program Studi Arsitektur, Institut Teknologi Bandung.
- Zed, M. (2017). Warisan penjajahan Belanda di Indonesia pasca-kolonial (perspektif perubahan dan kesinambungan). *Diakronika*, 17(1), 88-103. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18>